

## REORGANISASI DAN RASIONALISASI ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA DI JAWA TAHUN 1947-1949

Oleh : Devi Ellok Widaningsih, Prodi Ilmu Sejarah, Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, [ellokdevi@gmail.com](mailto:ellokdevi@gmail.com)

### Abstrak

Golongan pemuda menjadi pelopor dalam membentuk organisasi-organisasi perjuangan dalam rangka untuk mempertahankan kemerdekaan. Golongan pemuda memiliki anggapan bahwa dalam mempertahankan kemerdekaan tidak cukup dengan jalan diplomasi, sehingga sejak awal kemerdekaan pada saat kondisi sosial, ekonomi dan politik RI belum stabil terbentuk banyak organisasi bersenjata di samping terbentuk Angkatan Perang RI. Melihat kondisi yang terjadi pemerintah menjalankan kebijakan Reorganisasi dan Rasionalisasi (Rera) agar penggunaan tenaga AP menjadi efektif dan sesuai kondisi yang ada. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui proses pelaksanaan Rera di Jawa pada tahun 1947-1949. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Rera yang dilakukan pada masa Kabinet Amir Syarifudin dan Mohammad Hatta memiliki motivasi, konsep dan cara yang bertentangan untuk merealisasikan program Rera. Hal tersebut menjadi hambatan pelaksanaan Rera pada masa Kabinet Mohammad Hatta, namun cukup memiliki dampak pada APRI. Adanya Rera dalam AP menghasilkan pembagian tugas menjadi jelas, terbukti dengan terbentuknya staf AP, yang disampingnya terdapat pimpinan taktis yaitu Panglima Besar Angkatan Perang berdasarkan Undang- Undang No. 3 serta diperkuat dalam Penetapan Presiden No. 9 Tahun 1948. Selain itu Rera juga mengurangi adanya pengacau, serta terbentuk sistem penetapan pangkat dengan jelas. Adanya kebijakan tersebut membuat beberapa kelompok merasa tidak puas, dirugikan dan tersingkir. Akibatnya mereka melakukan penolakan dan pembelotan-pembelotan kepada pemerintah.

**Kata Kunci:** *Reorganisasi dan Rasionalisasi, Angkatan Perang RI, Jawa 1948.*

## REORGANIZATION AND RATIONALIZATION OF THE ARM FORCES OF REPUBLIC OF INDONESIA IN JAVA YEAR 1947-1949

### Abstract

*The youth group became the pioneers in forming struggle organizations in order to defend independence. Seeing the conditions occurred, the government runs the Reorganization and Rationalization (Rera) policy so that the use of AP power to be effective and in accordance with the existing conditions. The objective of this study is to know the process of Rera implementation in Java in 1947-1949. The result of this study indicates that the policy of Rera conducted during the Cabinet Amir Syarifudin and Mohammad Hatta has the motivation, concepts and conflicting ways to realize the Rera program. This is an obstacle to the implementation of Rera during the Mohammad Hatta Cabinet, but has enough impact on APRI. The existence of Rera in the AP resulted in a clear division of tasks, as evidenced by the formation of AP staff, in addition to the tactical leadership of the Great Commander of the Armed Forces under Law no. 3 and strengthened in Presidential Decree No. 9 Year 1948. In addition Rera also reduce the presence of vandals, as well as forming a system of determination of rank clearly. The existence of the policy makes some groups feel dissatisfied, harmed and marginalized. As a result they rejected and defected the government.*

**Keywords:** *Reorganization and Rationalization, Indonesian Armed Forces, Java 1948.*

## PENDAHULUAN

Setelah proklamasi kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan tiga kali sidang untuk membahas permasalahan yang dianggap penting dalam pembentukan pemerintahan suatu negara yang baru merdeka. Pada sidang kedua, golongan muda mendesak untuk segera dibentuk komite nasional dan tentara.<sup>1</sup> Kemudian sidang ketiga pada 22 Agustus 1945 menghasilkan pembentukan yang lebih kompleks dengan dibentuknya komite nasional, Partai Nasional Indonesia (PNI), dan Badan Keamanan Rakyat (BKR).

Hasil sidang PPKI ketiga menunjukkan bahwa ketika Indonesia merdeka tidak diikuti dengan pembentukan organisasi kemiliteran yang resmi. BKR yang terbentuk secara spontan dan masih bersifat kedaerahan bukan suatu organisasi kemiliteran.<sup>2</sup> Pembentukan BKR di masing-masing daerah memiliki dasar yang bebas bergabung dan tergantung pada Komite Nasional Indonesia (KNI) yang bertugas mengurus pemeliharaan serta pengadaannya.<sup>3</sup>

Tujuan awal pembentukan BKR digunakan untuk memelihara kedamaian daerah setempat, tidak digunakan dalam pertempuran menghadapi penjajah. Terbentuknya BKR sesuai dengan strategi golongan tua yang bersifat kehati-hatian dan lebih mementingkan perjuangan melalui diplomasi dibandingkan dengan pertempuran. Golongan muda dan para pejuang bersenjata merasa tidak puas dengan dibentuknya BKR, mereka beranggapan pimpinan kemerdekaan yang dijalankan oleh golongan tua melakukan kesalahan besar karena terlambat dalam membentuk tentara serta akan menyebabkan masalah di era-era selanjutnya. Hal tersebut terbukti pada masa Perang Kemerdekaan 1945-1949, meskipun sudah terbentuk ketentaraan

namun komando kemiliteran masih simpang-siur dan centang-perenang sehingga menghilangkan dan melunakkan unsur disiplin yang merupakan syarat pokok di dalam tentara.<sup>4</sup> Suasana yang penuh ketegangan, ancaman, serta ketidakpastian, menempatkan badan perjuangan sebagai katalisator bagi pemuda untuk beraksi.<sup>5</sup>

Selama melakukan perundingan, pada pertengahan 1947 Belanda memperkuat militernya dengan mendatangkan divisi baru di samping divisi *Koninklijk Nederlands-Indisch Leger* (KNIL) yang telah ada.<sup>6</sup> Perbedaan penafsiran yang terjadi pada diplomasi di Linggarjati menyebabkan pada 21 Juli 1947 Belanda melancarkan agresi pertamanya.<sup>7</sup> Peristiwa tersebut mengakibatkan pertikaian Indonesia dan Belanda sampai pada forum internasional yang melibatkan campur tangan negara-negara besar lainnya. Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menawarkan jasa baik kepada Indonesia dan Belanda untuk membantu penyelesaian pertikaian melalui komisi dewan yang terdiri dari tiga anggota dewan, masing-masing pihak memilih wakilnya dan yang ketiga dipilih oleh kedua negara yang mewakili. .

Hasil dari Diplomasi Renville ini mengecewakan banyak pihak, khususnya Indonesia yang mendapatkan banyak dampaknya. Beberapa point penting dalam persetujuan Renville yaitu Indonesia harus

<sup>1</sup> Adam Malik, *Mengabdikan Republik Jilid II*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hlm. 53-66.

<sup>2</sup> Saleh As'ad, *Ichtisar Sejarah Perjuangan ABRI 1945-Sekarang*, (Jakarta: tp, 1971), hlm. 2.

<sup>3</sup> George Mc Turnan Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, (Surakarta: UNS Press, 1995), hlm. 178.

<sup>4</sup> Yahya A. Muhaimin, *Perkembangan Militer Dalam Politik di Indonesia 1945-1966*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 41.

<sup>5</sup> Suhartono W Pranoto, *Revolusi Agustus: Nasionalisme Terpasung dan Diplomasi Internasional*, (Yogyakarta: Laper Pustaka Utama, 2001), hlm. 123.

<sup>6</sup> George Mc Turnan Kahin, *op.cit.*, hlm. 180.

<sup>7</sup> Kardiyat Wiharyanto, *Sejarah Indonesia dari Proklamasi sampai Pemilu 2009*, (Yogyakarta: Penerbit Universitas Sanata Dharma, 2011), hlm. 56.

mengakui garis van Mook.<sup>8</sup> Wilayah Indonesia yang semakin sempit akibat penandatanganan naskah perjanjian Renville mengakibatkan pasukan-pasukan (Kesatuan militer dan Badan Perjuangan) Indonesia yang berada di daerah kantong-kantong dan telah dikuasai Belanda harus ditarik mundur ke daerah Republik.

Kondisi wilayah Indonesia yang semakin sempit akibat persetujuan Renville tidak sesuai dengan jumlah tentara, badan perjuangan dan laskar-laskar yang banyak, hal tersebut yang menjadi salah satu faktor pemerintah melakukan Rera. Tujuannya sebagai langkah efisiensi anggaran dan efektifitas tentara dalam pertempuran di tengah blokade Belanda. Dilakukannya Rera juga untuk menciptakan adanya satu garis komando dalam Angkatan Perang (AP) Indonesia sebab di samping militer bentukan pemerintah juga terdapat laskar-laskar serta badan perjuangan yang memiliki orientasi politik kepada induk partai se-ideologi, sehingga tidak selalu searah dengan orientasi dan strategi kalangan militer (TKR).

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode sejarah. Metode sejarah merupakan proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau.<sup>9</sup> Menurut Nugroho Notosusanto metode penelitian sejarah dilakukan melalui empat tahapan yaitu

---

<sup>8</sup> Istilah yang dikeluarkan oleh van Mook pada 4 Agustus 1947. Garis van Mook merupakan garis antara tempat-tempat yang terdepan yang telah dicapai oleh pasukan Belanda sejak aksi militer dimulai pada 19 Juli sampai 4 Agustus 1947. Wilayah dibelakang garis dipandang sebagai daerah yang mereka kuasai meskipun pada kenyataannya daerah itu masih dikuasai pasukan-pasukan Republik. Mohammad Roem, *Bunga Rampai dari Sejarah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1972), hlm. 77.

<sup>9</sup> Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto, (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1975), hlm. 32.

heuristik (pengumpulan sumber), verifikasi (kritik sumber) eksternal dan internal, interpretasi (penafsiran), dan historiografi.

Heuristik merupakan kegiatan mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data-data sejarah yang digunakan untuk rekonstruksi peristiwa sejarah. Sumber yang digunakan dalam penulisan ini adalah sumber primer dan sumber sekunder.

Sumber primer ialah kesaksian dengan panca indra atau dengan alat mekanis yang terlibat secara langsung. Beberapa sumber primer yang digunakan dalam penulisan ini antara lain sebagai berikut:

ANRI, Surat dari Menteri Pertahanan No. 1780/Rh/T.I tanggal 8 April 1948 tentang laporan Reorganisasi Angkatan Persang.

ANRI, Surat dari wakil presiden No. 12241/Rh/T.I tanggal 6 Maret 1948 tentang permintaan opsir setiap divisi untuk pembentukan staf angkatan darat.

ANRI, Maklumat Wakil Presiden Republik Indonesia No. A/127/1948 tentang beberapa keputusan-keputusan dalam Angkatan Laut kearah rasionalisasi.

ANRI, Surat Keputusan Menteri Pertahanan No. A/625/1948 tanggal 17 November 1948 tentang Pembubaran Staf Umum Tentara Laut Dari bekas P.P.A.L.R.I (M.T.L)

Sumber sekunder adalah sumber sejarah yang disampaikan bukan oleh orang yang benar-benar mengalami dan menyaksikan suatu peristiwa sejarah secara langsung.<sup>10</sup> Kemudian tahap selanjutnya kritik sumber yang terdiri dari kritik eksternal dan internal untuk menentukan autentik dan kredibilitas sumber sejarah dan menghasilkan fakta sejarah.

Kritik eksternal dilakukan dengan pengujian aspek-aspek luarnya seperti dari mana sumber itu berasal, dari lembaga atau perorangan yang bisa dipercaya dan diakui kredibilitasnya, jenis serta ukuran kertas dan

---

<sup>10</sup> A. Daliman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 55.

sebagainya.<sup>11</sup> Sedangkan kritik internal mengacu pada kredibilitas sumber dengan memahami isi atau substansi dari dokumen dengan mengkomparasikan data tersebut dengan data lain.

Interpretasi atau penafsiran merupakan suatu tahap peneliti untuk menafsirkan sumber-sumber yang telah didapat dan diverifikasi sebagai upaya untuk merangkai antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya.. Penelitian ini menggunakan intepetasi analisis dan sintesis<sup>12</sup> yaitu dengan menguraikan data-data yang ada menggunakan berbagai pendekatan kemudian dipilih dan disesuaikan dengan fakta, yang diperoleh dari sumber lainnya. Tahap terakhir dari penelitian ini menghasilkan sintesis dari seluruh fakta yang ditemukan dalam suatu penulisan utuh yang disebut historiografi

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Terbentuknya Angkatan Perang RI

Pendudukan Jepang di Indonesia yang dimulai pada 1942-1945 membawa dampak yang cukup signifikan bagi perkembangan Indonesia. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya dalam bidang politik tetapi juga dalam bidang sosial budaya. Berbagai sumber menyebutkan bahwa tujuan pendudukan Jepang di Indonesia untuk mendapatkan sumber daya alam maupun sumber daya manusia guna mendukung kepentingan perang. Jepang melakukan berbagai cara untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar tujuannya tercapai.

Setelah dua bulan Jepang menduduki Indonesia, situasi Perang Asia Timur Raya mulai berubah dari strategi ofensif (menyerang) menjadi defensif (bertahan). Hal tersebut terjadi karena kekuatan pasukan Jepang yang berada di berbagai fron menjadi lemah dan mengalami kekalahan.

Melihat kondisi perangnya yang semakin melemah membuat pemerintah militer Jepang

segera mengambil tindakan menambah kekuatan dan melindungi wilayah-wilayah jajahannya. Hal tersebut jelas terlihat pada 24 April 1943 di pulau Jawa dikeluarkan pengumuman yang berisi kesempatan untuk pemuda sebagai pembantu prajurit atau yang sering dikenal dengan *Heiho*, pengumuman terkait perekrutan *Heiho* juga disebar luaskan di wilayah Sumatra pada awal Mei 1943.

AL Jepang juga melakukan perekrutan *Kaigun Heiho* di wilayah yang dikuasai. Para anggota *Heiho* mendapatkan pendidikan bahasa Jepang dan komando-komando dalam militer Jepang sekitar setengah tahun, serta latihan militer selama dua bulan.<sup>13</sup> *Heiho* dibentuk sebagai bagian resmi dari AD sehingga mereka bertugas di mana saja sesuai dengan kepentingan tentara Jepang. Pada awalnya pembentukan *Heiho* dimaksudkan untuk membantu pasukan-pasukan Jepang dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar AP Jepang, sehingga mereka tidak memiliki perwira dari kalangannya dan juga tidak diberi senjata, hanya diberi seragam yang lengkap.<sup>14</sup> Pada akhir-akhir perang *Dai Toa* pasukan *Heiho* yang sudah berhadapan dengan AP Sekutu terpaksa diberi senjata oleh militer Jepang.

Melibatkan seluruh kekuatan daerah pendudukan merupakan tujuan utama militerisme Jepang, sehingga pada periode 1943-1944 merupakan suatu masa pembentukan organisasi semimiliter maupun militer. Selain organisasi yang telah diuraikan di atas, masih ada beberapa organisasi yang ikut mendukung kekuatan militer bangsa Indonesia pada masa pendudukan Jepang seperti Barisan Pelopor (*Suishintai*) yang berdiri pada 1 November 1944, Barisan

<sup>13</sup> Atim Supomo, dkk, *BIMOB Dulu, Kini dan Esok*, (Yogyakarta: Korps BRIMOB POLRI), hlm. 9

<sup>14</sup> Kedudukan yang di berikan kepada *Heiho* meliputi prajurit, kopral dan sersan. Sedangkan tanda pangkat antara *Heiho* dan *Heitai* juga tidak berbeda, yang membedakan hanya warna dasarnya, Merah untuk *Heitai* dan Hitam untuk *Heiho*. ODP Sihombing, *Pemuda Indonesia menentang Fasisme Jepang*, Jakarta: Sinar Jaya, 1962. hlm. 140.

<sup>11</sup> Sugeng Priyadi, *Metode Penelitian Pendidikan Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2010), hlm. 37.

<sup>12</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013. hlm. 78.

Hizbullah yang berdiri pada 15 Desember 1944, Barisan Pelajar, *Fujinkai*, Barisan Puteri pada 3 November 1943 dan Barisan Srikandi padan April 1944.<sup>15</sup>

Pemanfaatan kekuatan di daerah pendudukan sebagai penjaga kampung, polisi kampung, pembantu prajurit sampai dengan militer penuh membuat orang Indonesia mendapatkan pengalaman militer dan makin percaya diri walaupun ada di bawah bayang-bayang kekuasaan militer Jepang. ketika

Kekaisaran Dai Nippon mengumumkan penyerahannya kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945 dengan segera golongan pemuda radikal mengambil tindakan untuk segera melaksanakan proklamasi dan bekerjasama dengan Peta. Golongan pemuda menyadari bahwa rencana tersebut harus didukung oleh kekuatan senjata dari Peta dan *Heiho* (darat dan laut), karena hal itu golongan muda yang diwakili oleh Yusuf Kunto dan Surakhmat mengunjungi asrama Peta di Jalan Jagamonyet.<sup>16</sup>

Proklamasi yang mendapat reaksi dari berbagai daerah menyebabkan Panglima militer Jepang melakukan pembubaran *Peta*, *Heiho* dan organisasi lainnya yang bersenjata dengan menarik kembali senjata yang telah diberikan Jepang. Beberapa unit-unit Peta di seluruh wilayah Jawa menolak mengembalikan senjata mereka, sehingga terjadi pertempuran perebutan senjata dengan Jepang, di beberapa daerah Peta berhasil melucuti unit-unit tentara Jepang.

Setelah terjadi pembubaran dan pelucutan senjata Peta, Indonesia yang baru merdeka tidak memiliki militer sebagai alat pertahanan atas ancaman baik dari luar ataupun dalam. Menghindari hal tersebut dibentuklah organisasi bersenjata bernama Barisan Keamanan Rakyat (BKR) pada 22 Agustus 1945 dalam sidang PPKI ke tiga yang bermarkas besar di Jakarta, berfungsi menjaga daerah bersama-sama dengan rakyat dan

badan-badan negara yang bersangkutan.<sup>17</sup> BKR tidak berada di bawah koordinasi Menteri Keamanan Rakyat sebab jabatan tersebut kosong hingga beberapa waktu. Hal tersebut mengakibatkan pemerintah tidak dapat

mengendalikan unit-unit BKR yang kebanyakan berdiri sendiri, dan tidak memiliki komando yang terpusat terkait pengangkatan korps perwira sehingga unit-unit daerah mengangkat komandan mereka sendiri.

Kondisi Indonesia yang semakin terancam mengakibatkan pemerintah mengambil kebijaksanaan untuk memperkuat AP dengan merubah badan-badan bersenjata yang tidak terkoordinasi untuk digantikan dengan suatu organisasi yang mempunyai hirarki struktural sehingga memungkinkan terlaksananya komando dan koordinasi.<sup>18</sup> Melalui "Maklumat Pemerintah" pada 5 Oktober 1945 BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), namun masih memiliki fungsi yang sama seperti BKR. Karena banyaknya organisasi setengah militer dan juga laskar-laskar, Markas Besar TKR mengeluarkan maklumat pada 6 Desember 1945 untuk menghilangkan kesimpang-siuran yang terjadi, maklumat berinti tetap memperbolehkan laskar-laskar berdiri meskipun sudah terbentuk TKR sebagai tentara resmi.<sup>19</sup>

Dari segi struktur nama AP telah mengalami perbaikan, selanjutnya terkait membangun tentara, melembagakan suatu pasukan yang berdisiplin dan dapat dikendalikan serta perencanaan militer lainnya diserahkan kepada seorang Mayor KNIL dan perwira Indonesia yang berpengalaman yaitu Urip Sumoharjo. Pada 20 Oktober 1945 pemerintah melakukan pengangkatan pada Kementerian Keamanan Rakyat, Urip Sumoharjo diangkat sebagai Kepala Staf Umum TKR, Menteri ad interim diberikan kepada Muhammad Sulyodikusumo yang dulunya sebagai *Daidancho* tentara Peta,

<sup>15</sup>Atim Supomo, dkk, *loc.cit.*,

<sup>16</sup> Suhartono W Pranoto, *Revolusi Agustus: Nasionalisme Terpasung dan Diplomasi Internasional*, Yogyakarta: Laper Pustaka Utama, 2001. hlm. 51.

<sup>17</sup>T. B Simatupang, *Pelopop Dalam Perang, Pelopor Dalam Damai*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1981), hlm. 55.

<sup>18</sup> Yahya A. Muhaimin, *op.cit.*, hlm. 23-25.

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. 26.

Pemimpin tertinggi TKR diberikan kepada Supriadi, pemimpin pemberontakan Peta Blitar, tetapi pengangkatan supriyadi hanya simbolis karena sejak Februari 1945 keberadaannya belum diketahui.<sup>20</sup>

Setelah satu bulan Jenderal Urip Sumoharjo berhasil membentuk Markas Tertinggi (MT) TKR yang berada di Yogyakarta dan Markas Besar Umum (MBU) yang merupakan bagian dari MT TKR, selain itu juga dibentuk empat komandemen dan 16 divisi yaitu enam divisi di Sumatera, tiga divisi di Jawa Barat, empat divisi di Jawa Tengah dan tiga divisi di Jawa Timur.<sup>21</sup> MBU TKR terdiri atas Bagian Administratif, Bagian Keuangan, Bagian Persenjataan, Bagian Perhubungan, dan Bagian Kesehatan, Bagian Urusan Kereta Api, Bagian, Pendidikan, Bagian Perlengkapan dan Bagian Penyelidikan.

Kosongnya jabatan Panglima Tentara dan Menteri Keamanan Rakyat yang cukup lama menyebabkan para perwira TKR mendesak pemerintah untuk segera melakukan pengangkatan pada jabatan tersebut, karena pasukan sekutu mulai bergerak ke pedalaman untuk melucuti garnisun-garnisun Jepang dan membebaskan tawanan perang pihak Sekutu. Permintaan itu tidak segera ditanggapi oleh pemerintah, sehingga pada 12 November 1945 Urip Sumoharjo memanggil semua panglima divisi dan resimen TKR menghadiri rapat terkait pengisian kedua jabatan yang diadakan di Yogyakarta.<sup>22</sup>

Pertemuan itu menghasilkan Sudirman terpilih menjadi Panglima Tentara, seorang perwira muda bekas opsir Peta. Terpilihnya Sudirman tidak terlepas dari latar belakang militer seorang bekas Peta yang tidak dapat dicurigai sebagai orang yang memiliki simpati kepada Belanda, berbeda dengan Urip

Sumoharjo yang menginginkan jabatan tersebut tetapi tidak terpilih, hal tersebut terjadi

<sup>20</sup> Ulf Sundhaussen, *Politik Militer Indonesia 1945-1965*, Jakarta: LP3ES, 2000. hlm. 14.

<sup>21</sup> Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, *Sejarah TNI Jilid 1 1945-1949*, (Jakarta: Pusjarah, 2000), hlm. 17.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

karena pada saat itu banyak perwira muda TKR mencurigai bekas opsir KNIL.<sup>23</sup> Terjadinya persaingan dan rasa saling curiga yang terjadi dalam tubuh militer antara opsir bekas Peta dan KNIL sudah terjadi sejak awal berdirinya APRI. Rapat yang dihadiri sebagian besar perwira Jawa Tengah dapat menjadi alasan lain terpilihnya Sudirman, hal itu dikarenakan kebanyakan dari mereka mengambil pertimbangan sebab Sudirman berasal dari daerah mereka juga.

Ketegangan yang terjadi di dalam TKR antara perwira Peta dan KNIL pada dasarnya karena jenis pengalaman dan pandangan militer mereka yang berlainan. Para perwira KNIL memiliki profesionalisme Barat didikan kolonial yang berprinsip bahwa militer semestinya mengabdikan pada pemerintah sipil yang mendapat dukungan dari para cendekiawan dan politisi yang berorientasi pada gagasan demokrasi liberal.

Berbeda dengan perwira didikan Jepang yang beranggapan seorang militer harus berani dan kedudukannya bergantung pada penilaian bawahannya serta mempertahankan prinsip bahwa pasukan dari orang-orang yang terlatih, penuh tekad dan pengabdian dapat mengatasi teknologi unggul.<sup>24</sup> Profesionalisme didikan Jepang dengan penguasa hanya terbatas pada tuntutan-tuntutan teknologi dan peperangan modern dengan ideologi yang didasarkan pada tradisi Jepang, sehingga bagi mereka militer tidak harus patuh kepada pemerintah sipil. Meskipun kedua kelompok perwira memiliki pandangan profesionalisme yang berbeda, tetapi kesadaran mengenai warisan sosial, politik dan militer Jawa serta beberapa persamaan lainnya telah mengaburkan perbedaan tersebut.

Golongan pemuda yang tidak puas dengan dibentuknya BKR membentuk badan-

<sup>23</sup> Selain latar belakang militernya nilai plus lainnya pada Sudirman ialah muslim, beretnik Jawa, berpengetahuan mistik dan memahami nilai-nilai tradisional Jawa memiliki daya tarik bagi korp perwira Jawa yang berjumlah besar. Ulf Sundhussen, *op.cit.*, hlm. 16.

<sup>24</sup> Britton, Petter, *Profesionalisme dan Ideologi Militer Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1996. hlm. 47.

badan perjuangan. Sebagian badan perjuangan juga memiliki seksi yang dipersenjatai yang dikenal dengan laskar. Sejak awal munculnya laskar dan badan perjuangan akibat dari revolusi tidak berada di bawah naungan organisasi, hanya berfungsi sebagai pengikat solidaritas pemuda atau rakyat yang berada dalam keadaan belum teratur dan terorganisasi dengan baik. Beberapa badan perjuangan juga telah berdiri sebelum pemerintah membentuk AP resmi, namun perkembangannya akan semakin pesat setelah pemerintah memberikan izin pendirian partai.

Pembentukan laskar-laskar pasca proklamasi untuk mempertahankan kemerdekaan dengan cepat menyebar ke seluruh Jawa. Banyak di antara mereka yang memperoleh senjata saat penyerahan Jepang, sehingga dalam bulan Oktober dan November 1945 berkembang pesat munculnya kelompok-kelompok pemuda dengan skala kecil, serta tidak tetap yang sebagian bersifat militer dan sebagian bersifat politik. Di daerah Surabaya berdiri Barisan Pemberontak Republik Indonesia (BPRI) yang dipimpin oleh Bung Tomo. Di Jawa Tengah berdiri Angkatan Muda Indonesia dan di daerah Bandung terbentuk Persatuan Pemuda Pelajar Indonesia.

Pada 1 Januari 1946 keluar ketetapan presiden No. 2 Tahun 1946 yang mengubah Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Namun, nama tersebut belum memuaskan sehingga pada 25 Januari 1946 keluar lagi maklumat yang mengganti Tentara Keselamatan Rakyat menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Dalam maklumat tersebut disebutkan bahwa TRI bersifat nasional dan satu-satunya organisasi militer, tetapi status dan kedudukan organisasi bersenjata lainnya seperti badan perjuangan, Barisan Rakyat, serta laskar-laskar yang berada di luar TRI tidak ditegaskan.<sup>25</sup> Hal tersebut akan menjadikan AP mengalami perselisihan dengan badan-badan perjuangan.

Banyaknya jumlah AP dalam TRI dan munculnya badan perjuangan serta laskar-laskar menyebabkan keluarnya ketetapan presiden terkait Panitia Besar Penyelenggara Organisasi Tentara dengan Urip Sumoharjo

sebagai ketuanya.<sup>26</sup> Panitia tersebut didominasi oleh bekas opsir KNIL yang memang memiliki pengalaman dibidangnya dengan tugasnya melakukan efisiensi tentara. Hasil kerja panitia pada rapat kedua tanggal 23 Mei 1946 mengurangi divisi TRI dari 16 menjadi 10 dengan rinciannya tujuh di Jawa dan tiga di Sumatera dengan menghapus komandemen-komandemen yang tidak berfungsi, serta menciptakan kesatuan-kesatuan yang sesuai antara jumlah personel dan senjata yang ada.<sup>27</sup>

Permasalahan status laskar yang tidak dipertegas Soekarno segera ditangani oleh Panitia Besar Penyelenggara Organisasi Tentara dengan mengundang berbagai organisasi kelaskaran pada 25 Mei 1946, yang menghasilkan persetujuan laskar-laskar untuk memperbaiki kerjasama dan menolak untuk dilebur dalam TRI.<sup>28</sup>

Meskipun begitu ketegangan dan persaingan tentara regular dan non regular terus berlangsung karena manipulasi-manipulasi politik dan kelangkaan sumber-sumber itu tetap ada. Hubungan antara badan perjuangan dan tentara di setiap daerah berbeda-beda sesuai dengan ideologi dan organisasi setempat serta kekuatan dan kelemahan dari saingan-saingan mereka. Di Jawa Barat Abdu Haris Nasution berhasil melebur beberapa golongan-golongan pemuda bersenjata Priangan ke dalam divisi melalui perundingan.

Setelah Amir Syarifudin menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada Mei 1946 mengambil inisiatif membentuk Biro Perjuangan dan inspektorat-inspektorat di daerah untuk mengatur laskar-laskar dan badan perjuangan yang terbentuk secara spontan atau didirikan partai-partai. Berbagai badan perjuangan dan laskar diorganisasikan menjadi brigade-brigade yang berada di bawah Menteri Pertahanan diakui sebagai militer di luar tentara regular.

---

<sup>26</sup> Saleh As'ad Djamuhari, *op.cit.*, hlm. 8.

<sup>27</sup> Susunan Angkatan Perang Indonesia pada pertengahan 1946 lihat di Ulf Sundhaussen hlm. 18-19.

<sup>28</sup>Ulf Sundhaussen, *op.cit.*, hlm 44.

---

<sup>25</sup>Yahya A Muhaimin, *op.cit.*, hlm. 28.

Tujuan lain dibentuknya Biro Perjuangan untuk menciptakan koordinasi yang baik dan penegasan pembagian tugas antara tentara regular dan non regular dalam perjuangan, namun karena kebanyakan laskar dan badan perjuangan menaungi partai politik tertentu di dalam tindakannya lebih mengutamakan partainya daripada tugas pokoknya. Selain itu Biro Perjuangan yang berada di bawah Menteri pertahanan dijadikan alat politik dengan menyesuaikan program kerja Biro Perjuangan dengan program kerja partai sosialis.

### **B. Pelaksanaan Reorganisasi Dan Rasionalisasi Angkatan Perang RI Tahun 1947-1948**

Sejak menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Amir Syarifuddin sudah mendapat pandangan negatif dari beberapa partai terkait kebijakannya. Hal tersebut dilatarbelakangi kekuasaan yang diduplikasinya disalahgunakan untuk kepentingan kelompok sosialis. Amir Syarifuddin telah memperkuat kedudukannya sejak berada dalam Kabinet Sutan Syahrir dengan menguasai Biro Perjuangan dan melakukan indoktrinasi ideologi politik yang dianutnya.<sup>29</sup> Karena hal tersebut beberapa kongres yang diadakan oleh partai-partai pada awal tahun 1947 mendesak pemerintah untuk menghapuskan inspektorat-inspektorat dari Biro Perjuangan. Selain itu Amir Syarifuddin mengangkat seorang sipil sosialis menjadi Gubernur Militer Surakarta serta mendirikan sekolah sipil militer dengan pendidikan sosialis.<sup>30</sup>

<sup>29</sup>Biro Perjuangan mengasuh laskar dan badan perjuangan menjadikan tentara kedua karena jumlah anggotanya melebihi AP yaitu 430.000, sedangkan AP hanya 350.000. Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasionalisme 1945-1965*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1987. hlm. 172-173.

<sup>30</sup>Abdoel Fattah, *Demiliterisasi Tentara: Pasang Surut Politik Militer 1945-2004*, (Yogyakarta: LKiS, 2005), hlm. 56-58. lihat juga Deliar Noer, *op.cit.*, hlm 173.

Beberapa bulan menjabat sebagai

Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan, Amir Syarifuddin mendapat beberapa kritikan dari H. Samawi selaku redaktur Kedaulatan Rakyat terkait kepemimpinannya. Tidak lama setelah keluarnya opini dari media Kedaulatan Rakyat, akhir tahun 1947 usaha-usaha untuk merasionalisasikan AP mulai merambat ke dalam BP KNIP. Meskipun demikian usaha-usaha yang berjalan masih sebatas wacana, hingga akhirnya muncul Mosi Zainul Baharudin pada 20 Desember 1947.

Zainul Baharudin mengusulkan supaya Angkatan Bersenjata ditempatkan sepenuhnya di bawah Menteri Pertahanan dan menghendaki agar kekuatan tentara dikurangi, serta meminta agar para veteran diberi pekerjaan produktif atau pekerjaan lainnya dalam pemerintahan.<sup>31</sup> Dapat ditarik benang merah bahwa mosi Zainul Baharudin didasarkan tidak ada pembagian tugas yang jelas dalam ketentaraan, pada saat itu Kementerian Pertahanan hanya menjalankan fungsi administratif, sedangkan badan ketentaraan melaksanakan bidang strategis dan teknis, sehingga Menteri Pertahanan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

Usul-usul dalam rapat BP KNIP diterima oleh Amir Syarifuddin dan Soekarno, kemudian ditandai dengan penandatanganan dekret pada 2 Januari 1948 yang memerintahkan semua kekuasaan di bidang pertahanan dipusatkan di bawah Menteri Pertahanan.<sup>32</sup>

Belum selesai dengan kritikan terhadap mosi Zainul Baharudin, Amir Syarifuddin menyatakan mengikuti Diplomasi Renville. Hal tersebut mengakibatkan fraksi-fraksi dalam parlemen mulai bergejolak, salah satunya partai Masyumi yang mengkritik melalui Sukiman. Setelah menyetujui Perjanjian Renville, Kabinet Amir Syarifuddin jatuh akibat mosi tidak percaya dari parlemen yang dipelopori oleh Masyumi dan PNI.<sup>33</sup> Masyumi dan PNI memandang usaha-usaha

<sup>31</sup>Ulf Sundhaussen, *op.cit.*, hlm. 64.

<sup>32</sup>Abdul Haris Nasution, *Memenuhi Panggilan Tugas 2*, (Jakarta: Gunung Agung, 1983), hlm. 4.

<sup>33</sup>Ulf Sundhaussen, *op.cit.*, hlm. 34.

Amir Syarifuddin dalam perundingan Renville sangat tidak menguntungkan RI.

Beberapa kebijakan kabinet Amir Syarifuddin menimbulkan parlemen mengeluarkan mosi tidak percaya yang kemudian dibubarkan, kemudian Soekarno menunjuk wakil presiden Mohammad Hatta sebagai formateur kabinet yang baru.<sup>34</sup>

Kabinet Mohammad Hatta diumumkan pada 31 Januari 1948, selain menjabat sebagai Perdana Menteri, Mohammad Hatta merangkap sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya Mohammad Hatta menyusun program-programnya yang diumumkan didepan BP KNIP pada 16 Februari 1948. Garis besar kebijakan yang akan dilakukan Mohammad Hatta secara eksplisit mengakui persetujuan Renville dan semua kewajiban yang ditimbulkan, mempercepat pembentukan Negara Republik Indonesia Serikat (NIS), mengadakan rasionalisasi ke dalam dan melanjutkan pembangunan yang tertunda.<sup>35</sup>

Terkait rasionalisasi pada APRI yang sudah dimulai pada Kabinet Amir Syarifuddin, namun belum memberikan hasil pada AP akan tetap dilanjutkan Mohammad Hatta. Beberapa faktor yang menyebabkan Mohammad Hatta tetap melanjutkan program tersebut dikarenakan kondisi ekonomi RI semakin memburuk, selain itu kondisi APRI harus disempurnakan agar dapat menghadapi ancaman dari luar dan mempertahankan kemerdekaan.

Hal tersebut mengakibatkan munculnya kekhawatiran dan kekecewaan pada kelompok laskar dan badan perjuangan yang juga terkena rasionalisasi. Masalah pendidikan dan kecakapan dalam militer menyebabkan posisinya menjadi terancam dan merasa dirugikan. Terlepas dari kekhawatiran AP, Laskar dan Badan Perjuangan yang akan dirasionalisasi, kebijakannya telah di atur dalam Penetapan Pemerintah No.3 Tahun 1948. Mohammad Hatta akan menjalankan Rera AP dengan tiga cara, pertama dengan melepaskan mereka yang suka rela mau meninggalkan tentara, misalkan yang ingin

kembali ke pekerjaan lamanya sebagai guru atau swasta, kedua dengan menyerahkan mereka kepada Kementerian Pembangunan dan Pemuda untuk diberi pekerjaan, dan terakhir mengembalikan 100.000 orang ke masyarakat.<sup>36</sup>

Di muka telah disampaikan bahwa Mohammad Hatta akan menjalankan hasil perjanjian Renville yang telah mencapai kesepakatan. Salah satunya menarik angkatan bersenjata dari wilayah yang menjadi milik Belanda. Beberapa AP yang harus hijrah seperti divisi Siliwangi dari Jawa Barat, Resimen Damarwulan yang berkedudukan di Karesidenan Besuki juga diharuskan pindah ke wilayah Malang Selatan dan masih banyak lagi contoh pasukan yang harus hijrah.<sup>37</sup> Usaha pemindahan ini sekaligus proses penataan angkatan bersenjata yang sesuai dengan kebijakan Rera Kabinet Mohammad Hatta.

Salah satu proses hijrah dari Divisi Siliwangi ke daerah RI berakhir pada 22 Februari 1948.<sup>38</sup> Tidak lama setelah hijrahnya pasukan Siliwangi, pada 27 Februari 1948 keluar Ketetapan Presiden No. 9 yang berinti Rera AP akan dilaksanakan di dalam Kementerian Pertahanan maupun dalam Markas Besar Angkatan Perang (MBAP), kedudukan Panglima Besar tidak lagi berada di bawah Kepala Satuan Angkatan Perang (KSAP) Komodor Suryadarma dan menghapus Pucuk Pimpinan TNI dan Gabungan Kepala Staf. Dalam melakukan Rera pada Kementerian Pertahanan melalui Ketetapan Presiden No.9 Tahun 1948 dimulai dengan dibentuk Staf Umum AP di bawah pimpinan Komodor Suryadarma sebagai KSAP dan Kolonel Simatupang sebagai wakil, serta mengangkat Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besar Angkatan Perang Mobil dan

<sup>36</sup>Abdoel Fattah, *op.cit.*, hlm. 70.

<sup>37</sup>Ari Sapto, "Perang, Militer Dan Masyarakat: Pemerintahan Militer pada Masa Revolusi dan Pengaruhnya pada Indonesia Kini", *Sejarah dan Budaya*, Vol. VII, No. 1, 2013, hlm 21.

<sup>38</sup>*Kedaulatan Rakyat*, 9 Februari 1948.

<sup>34</sup> Yasni, *Bung Hatta Menjawab*, (Jakarta: Gunung Ajiung, 1980), hlm. 15-16.

<sup>35</sup>Yahya A. Muhaimin, *op.cit.*, hlm. 52.

Jenderal Mayor Abdul Haris Nasution sebagai wakil.<sup>39</sup>

Selanjutnya pada 28 Februari 1948 Mohammad Hatta mengadakan pertemuan bersama komandan-komandan divisi I-VII yang bertujuan memberikan pemahaman terkait Rera.<sup>40</sup> Setelah adanya pertemuan tersebut, disahkan Undang-Undang No.3 Tahun 1948 tentang organisasi Kementerian Pertahanan dan APRI pada 5 Maret 1948. Pengesahan UU No.3 Tahun 1948 menimbulkan reaksi-reaksi keberatan, sebagian besar dari panglima-panglima divisi. Reaksi itu disebabkan UU No.3 Tahun 1948 hanya menghasilkan peraturan-peraturan untuk Kementerian Pertahanan dan Pimpinan tertinggi AP, sedangkan untuk Rera tingkat pasukan dan daerah-daerah tidak tercantum dalam UU tersebut.<sup>41</sup>

Terkait pelaksanaan Rera pasukan dan daerah-daerah Panglima Besar mengeluarkan Perintah Harian No. 37 pada 25 Maret 1948, untuk melakukan reorganisasi kesatuan-kesatuan mobil dan teritorial, reorganisasi kesatuan divisi dan eselon-eselon di bawahnya.<sup>42</sup> Perintah harian tersebut didasarkan untuk menghadapi kemungkinan serangan yang akan datang sekaligus pelaksanaan Rera. Tugas tersebut diberikan

<sup>39</sup> Abdul Haris Nasution, *Tentara Nasional Republik Indonesia II*, (Jakarta: Seruling Masa, 1968), hlm. 144-147.

<sup>40</sup> ANRI, *Surat Perintah, No. 12241/Rh/T1. Berisi pembubaran MBT dan pembagian tugas pada Staf Angkatan Darat dalam Kementerian Pertahanan dan Markas Besar Angkatan Mobil*.

<sup>41</sup> Undang-Undang tersebut sudah dirancang sejak Kabinet Amir Syarifuddin pada 6 Maret 1948, ditandatangani pada 5 Mei 1948. Dinas Sejarah Militer Kodam VII/Diponegoro, *SejarahRumpun Diponegoro dan Pengabdiannya*, (Semarang: Yayasan Penerbit Diponegoro, 1977), hlm. 175.

<sup>42</sup> Soedarko Brigjen TNI, *Menyusun Kekuatan Bersenjata*, (Jakarta: Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, 1991). hlm. 90-92.

kepada wakil Panglima Angkatan Perang Mobil Jenderal Mayor Abdul Haris Nasution yang sudah berpengalaman menghadapi Agresi I untuk merumuskan strategi pertahanan AP. Menurut strategi Jenderal Mayor Nasution di Jawa akan dibentuk menjadi empat dari tujuh divisi, sebagian kesatuan akan bergerilya ke daerah yang dikuasai Belanda dan sebagian kesatuan lainnya menyusup ke Jawa Barat, Kalimantan dan wilayah RI bagian Timur.<sup>43</sup>

Menindaklanjuti Perintah Harian No.37 selain akan dilaksanakan Rera pada divisi-divisi juga akan dibentuk pasukan mobil dan teritorial. Pasukan mobil anggotanya berasal dari pasukan resimen dengan ketentuan setiap divisi dibentuk satu batalyon mobil untuk tiap karesidenan. Sedangkan pasukan teritorial anggotanya diambilkan dari kelebihan setelah pembentukan pasukan mobil.<sup>44</sup> Komando sub teritorial di setiap karesidenan akan difungsikan membina perlawanan rakyat dan pertahanan sipil.

Pengurangan dan penciptaan divisi tersebut menimbulkan rasa tidak puas di kalangan AP maupun laskar yang dirasionalkan, bagi yang tidak terkena rasionalisasi mereka juga tidak puas apabila tidak masuk dalam pasukan mobil sebagai AP garis kesatu. Hal tersebut dikarenakan kurangnya penerusan informasi ke bawah mengakibatkan rencana tersebut tidak dipahami menyeluruh oleh panglima-panglima divisi. Disisi lain Rencana Rera juga diprovokasikan sebagai upaya memilah-milah AP menjadi tentara kelas satu dan tentara kelas kambing, sehingga sebagian besar pasukan menginginkan ditempatkan sebagai pasukan garis kesatu yang memiliki tugas bertempur.<sup>45</sup>

<sup>43</sup> Abdul Haris Nasution, 1968, *op.cit.*, hlm 166.

<sup>44</sup> Pada pertahanan teritorial terdiri dari wilayah kecamatan yang dipimpin Komando Onder Distrik Militer (KODM), ditingkat kabupaten terdapat Komando Militer Daerah (KMD) dan tingkat karesidenan ada Sub-Teritorial Militer (KSTM). Abdul Haris Nasution, *Pokok-Pokok Gerilya dan Pertahanan Republik*, (Bandung: Angkasa, 1980), hlm, 120.

<sup>45</sup> Menurut golongan oposisi tentara tentara kelas kambing meliputi laskar-

Hal tersebut mengakibatkan para komandan berlomba-lomba membentuk sebanyak-banyaknya brigade untuk mendapat status tentara kelas satu (batalyon-batalyon mobil), padahal di dalam brigade tersebut kekurangan persenjataan. Kondisi tersebut menimbulkan rencana pembagian tugas yang objektif dari dibentuknya kesatuan mobil dan kesatuan teritorial menjadi kacau.

Pelaksanaan reorganisasi yang tidak berjalan lancar dan menghadapi kesulitan membuat Panglima Besar Sudirman mengangkat empat perwira sebagai formatur pelaksanaan Rera, yang bertugas mengatur pelaksanaan Rera di setiap wilayah tugasnya. Empat formatur tersebut ialah Jenderal Mustopo bertugas untuk wilayah Jawa Timur, Letnan Kolonel Abimanyu di daerah Jawa Tengah sebelah Timur, Jenderal Mayor Sudibyo Jawa Tengah Sebelah Barat, dan Jenderal Mayor Abdul Haris Nasution bertugas di Kesatuan Reserve Umum. Namun pada kenyataannya reorganisasi tetap tidak berjalan dengan baik, terutama terkait pengangkatan pejabat-pejabat tinggi militer yang baru dalam divisi.

Melihat persoalan pengangkatan pejabat yang mengalami hambatan, wakil presiden memanggil Panglima Besar bersama formaturnya untuk membicarakan permasalahan tersebut. Pada akhirnya permasalahan tersebut diselesaikan dengan pengeluaran Penetapan Presiden No. 14 pada 4 Mei 1948 yang lebih menegaskan mengenai teknis pelaksanaan Rera terkait Susunan Kementerian Pertahanan yang sesuai dengan undang-undang No. 3 tahun 1948.

Sistem kepangkatan memang diperlukan bagi militer yang profesional, karena hal itu mencerminkan prestasi yang dicapai oleh seorang perwira, pengalaman, jasa-jasa dan pendidikan. Dalam mengatur kembali sistem kepangkatan untuk menyempurnakan APRI terdapat dua macam kepangkatan yaitu *aching rank* dan *effective rank*. *Aching rank* diberikan kepada AP yang memiliki jabatan-jabatan tertentu, sedangkan *effective rank* merupakan pangkat yang diberikan berdasarkan

pendidikan, pengalaman dan jasa AP.<sup>46</sup> Penertiban sistem pangkat tersebut diperkuat dengan Ketetapan Presiden No. 14 tahun 1948. Melalui ketetapan itu semua pangkat perwira diturunkan satu tingkat, kecuali untuk Letjen Urip Sumoharjo, Letjen Sudirman dan Jenderal Mayor Suhardjo memiliki pangkat tetap.<sup>47</sup>

Setelah keluarnya Ketetapan Presiden No. 14, Panglimas Besar mengeluarkan perintah pelaksanaan termasuk serah terima jabatan divisi lama dan baru. Pada kenyataannya Rera tetap tidak berjalan sesuai dengan perintah, tidak semua komandan divisi lama mau menyerahkan jabatannya kepada komandan divisi baru. Hal tersebut terlihat pada divisi III baru Komandan Bambang Supeno yang hanya menerima satu brigade dari Kolonel Sungkono. Rera pada divisi IV juga tidak terlaksana karena beberapa perwiranya telah dipengaruhi Partai Komunis

Republik Indonesia (PKI).<sup>48</sup> Terjadinya beberapa penolakan panglima divisi terhadap pelaksanaan Rera serta kondisi Republik Indonesia saat itu sedang menghadapi serangan Belanda membuat Panglima Besar Sudirman melakukan peninjauan kembali Perintah Harian No. 37 serta ketetapan Presiden No. 14 Tahun 1948. Peninjauan kembali tersebut menetapkan pembatalan pembentukan divisi baru dengan solusi melanjutkan divisi-divisi lama dengan nama komando pertempuran, dan menghapus jabatan wakil Panglima Besar AP.

Tidak lama setelah itu pada Agustus 1948 Kolonel Abdul Haris Nasution

<sup>46</sup> *Aching rank* untuk jabatan-jabatan tertentu misalnya Kmandan Divisi, *aching rank* Jenderal Mayor/Kolonel, Komandan Brigade, *Aching rank* Letnan Kolonel, dan Komandan Batalyon, *aching rank* Mayor. Toer, P.A., Koesalah Soebagyo Toer, Ediati Kamil, *Kronik Revolusi Indonesia Jilid IV (1948)*, (Jakarta: KPG, 2003, hlm. 232.

<sup>47</sup> Mohammad Hatta, "Rasionalisasi TNI dalam Tahun 1948", *Pidato di Fakultas Sastra Universitas Indonesia*, tahun 1972, hlm. \_

<sup>48</sup> Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, *op.cit.*, hlm. 61.

laskar dan kesatuan regular. Ulf Sundhaussen, *op.cit.*, hlm. 70.

menyampaikan memorandum tentang kemungkinan terjadinya serangan Belanda lagi.<sup>49</sup> Menangani kemungkinan yang terjadi yang didasarkan pengalaman akhir tahun 1947 akan melakukan suatu pertahanan dengan melakukan perang gerilya. Hal tersebut dilakukan karena persenjataan yang dimiliki oleh tentara RI tidak sebanding dengan tentara Belanda.<sup>50</sup> Melihat kondisi saat itu dengan pertimbangan taktis militer, Panglima Besar Jenderal Sudirman menyendikan reorganisasi sebagai konsep pertahanan, sehingga para panglima dapat mengerti perlunya Rera dengan mengeluarkan Perintah Siasat I. Rencana Operasi dan pertahanan disusun Kepala Staf Operasi Kolonel Abdul Haris Nasution.<sup>51</sup>

Ditengah pemerintah sedang menyempurnakan AP, muncul pemberontakan dari pihak oposisi di Madiun yang lebih utama akan diselesaikan dulu dibanding permasalahan internal. Adanya peristiwa Madiun terjadi penyaringan alamiah, yang berdampak pada kebijakan Rera. Kekuatan oposisi yang merupakan salah satu faktor penghambat Rera dapat diselesaikan, dengan alamiah berbagai organisasi bayangan AP seperti TNI-Masyarakat, TLRI-Atmadji dan Biro Perjuangan dapat ditumpas. Dilihat secara fisik kekuatan angkatan bersenjata berkurang antara 25%-30%. Hal tersebut terbukti pada AP yang ada di Jawa Timur, setelah peristiwa Madiun terjadi perubahan yang cukup signifikan.

<sup>49</sup>Ulf Sundhaussen, *op.cit.*, hlm. 67.

<sup>50</sup> Pasukan teritorial dari orang-orang daerah untuk mempertahankan daerahnya dengan melakukan serangan-serangan kecil dan menjamin perbekalan pasukan tempur mobil. Sedangkan pasukan tempur mobil dipersenjatai lengkap yang memasuki medan perang yang dikuasai Belanda. *Ibid.*, hlm 68.

<sup>51</sup> Saat genjatan senjata di Jawa terdapat 350.000 anggota tentara regular dan 470.000 anggota laskar, dengan jumlah sebanyak itu harus dikurangi 160.000 orang untuk membentuk tentara yang terlatih dan bersenjata lengkap. Abdul Haris Nasution, 1968, *op.cit.*, hlm. 130.

Dalam Peristiwa Madiun militer Jawa Timur kehilangan 15.752 personilnya, salah satu penyebabnya beberapa kesatuan melakukan penolakan terhadap pasukan kiri.<sup>52</sup>

Setelah terjadi pemberontakan PKI di Madiun pada September 1948, di Pulau Jawa terdapat empat divisi dan dua brigade. Divisi I Jawa Timur dipimpin oleh Kolonel Sungkono yang terdiri enam brigade dan berkedudukan di Kediri, divisi II Jawa Tengah bagian timur di bawah komandan Gatot Subroto terdiri dua brigade dan empat sub teritorium, divisi III terdiri dari empat brigade berkedudukan di Magelang di bawah Letkol Kolonel Bambang Sugeng, terakhir divisi IV Siliwangi di bawah pimpinan Letkol Kolonel Daan Yahya terdiri empat brigade.<sup>53</sup> Sedangkan dua brigade di Jawa terdiri dari brigade 16 merupakan gabungan laskar-laskar seberang, dan brigade 17 diisi tentara-tentara pelajar. Rencana perubahan divisi-divisi pada Mei 1948 mulai berjalan, seperti divisi IV yang berada di bawah Kolonel Sutarto awalnya tidak mau menjalankan penetapan Presiden No. 14 Tahun 1948 melaksanakan reorganisasi dalam divisinya.

### C. Dampak Reorganisasi Dan Rasionalisasi Angkatan Perang Republik Indonesia

Kekuatan AP di Surakarta sangat beragam namun sebagian besar mendapat pengaruh dari golongan kiri seperti Amir Syarifuddin dan Muso yang bergerak dalam FDR. Situasi wilayah Surakarta mulai terlihat adanya ketidakseimbangan ketika menjadi tempat dari pasukan-pasukan hijrah dari pasukan Divisi Siliwangi dan Barisan Banteng yang dipimpin oleh dr. Muwardi yang anti dengan FDR.<sup>54</sup> Selain AD, di Surakarta juga

<sup>52</sup> Anderson, D.C, "*The Military Aspects of the Madiun Affair.*" **Indonesia** No.21 (April), (Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project, 1976), hlm. 52.

<sup>53</sup>*Ibid.*, hlm. 256-257.

<sup>54</sup> Kekuatan utama daerah Surakarta berasal dari Resimen 26 di bawah pimpinan Letnan Kolonel Suadi, resimen ini terdiri dari empat Batalyon. Dua Batalyon berada di Solo, dua yang lain

menjadi pangkalan dari Divisi II TLRI yang dipimpin oleh Kolonel Achmad Jadao dan Suyoto yang juga menentang formasi teritorial baru. Rencana Rera awal Divisi IV Panembahan Senopati dari pemerintah akan digabung dengan Divisi II TLRI, namun pasukan TLRI II menentanginya.

Peleburan Divisi II TLRI ke dalam satuan AD yang secara tiba-tiba membuat mereka tidak puas dan dianggap menyulitkan dalam penyesuaian diri ditengah-tengah ancaman kekuatan Belanda. Sebagai bukti penolakan terhadap rencana tersebut, kedua divisi melakukan parade kekuatan senjata pada 20 Mei 1948 di Surakarta.<sup>55</sup> Melihat aksi yang telah dilakukan oleh kedua divisi tersebut

pemerintah meredam kondisi dengan mengeluarkan perintah TLRI tidak akan dilebur, namun dibentuk terpisah ke dalam Divisi Panembahan Senopati yang tetap dipimpin oleh Letnan Kolonel Achmad Jadao. Tidak lama kemudian sebelum digabung dalam Divisi Panembahan Senopati, Divisi II TLRI mendapat tambahan kekuatan. Dari uraian di atas disimpulkan sebagian besar kesatuan AP di Surakarta kurang mendapat kontrol dari MBT ataupun Pemerintah Pusat. Hal itu juga menjadi alasan perintah pada 25 Mei 1948 terkait reorganisasi kesatuan-kesatuan mobil dan teritorial tidak dapat berjalan karena laskar dan pasukan setempat menolak keras rencana tersebut.

Setelah berada di wilayah hijrah, Divisi Siliwangi melakukan Rera di dalam jajarannya. Hasil Rera Divisi Siliwangi tersebut berhasil menyusun tiga brigade tempur. Di wilayah Surakarta ditempatkan pasukan Siliwangi khususnya Brigade II yang berada di bawah pimpinan Letnan Kolonel Sadikin.<sup>56</sup> Adanya pasukan Siliwangi Brigade

di Surakarta menimbulkan persoalan-persoalan. Secara psikologis dan fisik tidak mudah bagi pasukan Siliwangi menyesuaikan diri dengan wilayah hijrah. Kehadiran pasukan Siliwangi di Surakarta tidak diterima dengan baik, mereka dianggap sebagai orang asing dan dimusuhi oleh masyarakat. Hal tersebut diakibatkan dari provokasi-provokasi

yang dilakukan pihak kiri, yang memprovokasikan Divisi Siliwangi sebagai pasukan yang mengkhianati perjuangan bangsa.

Menumpuknya berbagai macam kesatuan militer dan pasukan laskar di Surakarta menimbulkan gesekan antara sesama kekuatan militer.<sup>57</sup> Gesekan antara pasukan tersebut diakibatkan kekuatan-kekuatan militer yang berada di wilayah Surakarta dapat dikelompokkan menjadi pasukan yang pro dengan kebijakan pemerintah terutama terkait Rera dengan pasukan anti pemerintah.<sup>58</sup>

Kekuatan TLRI di Jawa memiliki tiga divisi dengan jumlah pasukan yang cukup besar. Jumlah pasukan TLRI memasuki tahun 1948 hampir 27.000 anggota yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Adanya Rera mengakibatkan TLRI harus dihapuskan dan dilebur ke dalam AD serta hanya ada CA sebagai kekuatan inti ALRI. Hal tersebut membuat ruang gerak TLRI menjadi terbatas termasuk para pelopornya seperti Kolonel Katamhadi dan Kolonel Atmadji yang di pindah tugaskan ke dalam Kementerian Pertahanan di Yogyakarta, namun mereka menolak.<sup>59</sup> Kolonel Atmadji menganggap

sedangkan Brigade I di Yogyakarta di bawah pimpinan Letnan Kolonel Alex Kawilarang. *Ibid.*, hlm. 103.

berada di Pacitan dan Klaten. Himawan Soetanto, *Madiun dari Republik ke Republik*, (Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2006), hlm. 100.

<sup>55</sup> Yanuar Ridho N. A. Y. P, Peranan Kolonel Gatot ubroto pada Masa Darurat Militer di Surakarta Tahun 1947-1950, "*Skripsi*", (Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2013), hlm.55.

<sup>56</sup> Brigade III dipusatkan di Magelang di bawah Letkol Eddy Sukardi

<sup>57</sup>Badan Kelaskaran yang berada di daerah Surakarta terdiri dari Pesindo, BPRI, dan Hisbullah. Himawan Soetanto. *op.cit.*, hlm. 143.

<sup>58</sup>Nugroho Notosusanto, Marwati Djoened Poesponegro, *op.cit.*, hlm 237.

<sup>59</sup>Adi Patrianto S, "**Angkatan Laut** Republik Republik Indonesia Pangkalan IV Tegal (1945-1948); studi tentang sejarah organisasi dan peran Angkatan Perang RI pada masa perang kemerdekaan

bahwa kedudukan dan kelompoknya dirugikan serta tersingkir dengan adanya Rera, hal itu menimbulkan dia mencari perlindungan dan menggalang kekuatan.

## KESIMPULAN

Kebijakan Rera pada AP yang mulai diusung pada Kabinet Amir Syarifuddin dan dilanjutkan pada masa Kabinet Mohammad Hatta memiliki gagasan dan titik tolak yang sama, tetapi kedua tokoh tersebut memiliki motivasi, konsep dan cara yang bertentangan untuk merealisasikan program Rera. Amir Syarifuddin menginginkan suatu APRI yang dikuasai oleh partainya dengan konsep tentara reguler model komunis yang bersifat populis. Berbanding terbalik dengan Mohammad Hatta yang menginginkan APRI terbentuk profesional non politik dan setia kepada negara melalui pemerintah yang sah. Mohammad Hatta menggunakan konsep *militarizing the military* untuk mencapai pengendalian sipil obyektif dengan cara memperbesar profesionalisme golongan militer tetapi memperkecil kekuasaan, namun tidak menghapusnya. Maksudnya AP tetap diberi kekuasaan namun terbatas, sesuai dengan keperluan untuk menjalankan profesinya.

Corak pemikiran yang kontradiktif antara kedua tokoh tersebut menyebabkan hambatan, ketika Kabinet Mohammad Hatta menjalankan Rera untuk membentuk AP yang profesional, teratur, dan efisien selalu dihadapkan pada tentangan golongan Amir Syarifuddin. Selain itu konsep pemikiran Mohammad Hatta dalam menjalankan Rera AP yang berdasarkan kondisi ekonomi yang sedang terjadi dijadikan agitasi oleh golongan PKI. Ditambah lagi kondisi RI yang belum stabil dan belum tercapainya penyelesaian politik dengan Belanda membuat pelaksanaan penyempurnaan AP yang profesional dari segi keahlian, pendidikan dan lain sebagainya sesuai dengan standar internasional masih sulit dilakukan. Meskipun begitu pengurangan jumlah anggota untuk mencapai AP yang efisien, dapat dibiayai oleh negara, memiliki keseimbangan antara persenjataan dan personel merupakan proses profesionalisasi yang sudah cukup berhasil dilakukan pada Kabinet Mohammad Hatta.

Hal tersebut terlihat sebelum Rera AP dijalankan oleh Mohammad Hatta pimpinan pusat AP terdiri dari berbagai badan yang tidak tegas mengenai pembagian tugas dan sering bertentangan. Setelah adanya Rera AP berdasarkan UU No. 3 tahun 1948 dan diperkuat Penetapan Presiden No. 9 tahun 1948 menghasilkan Staf Angkatan Perang yang disampingnya terdapat pimpinan taktis yaitu Panglima Besar Sudirman. Meskipun tidak dapat disangkal bahwa perubahan tersebut hanya secara strukturnya dan dalam pelaksanaannya masih mengalami banyak hambatan. Selain itu rencana pemisahan antara pasukan mobil, dan teritorial untuk mengefektifkan pasukan berujung konflik, rencana tersebut diagitasi untuk membentuk AP kelas satu, dua dan kelas kambing atau sampah rasionalisasi. Hal itu menyebabkan rencana Rera yang sudah direncanakan tidak dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan. Sementara itu, adanya Rera pada AP Laut juga telah mengurangi konflik internal yang terjadi. Dalam sejarah perkembangan ALRI, sejak awal kemedekaan dalam AP Laut muncul dualisme komando. Sehingga adanya Rera Laut yang di implementasikan dengan pembentukan Pucuk Pimpinan ALRI, selanjutnya diteruskan Komisi Reorganisasi Angkatan Laut (KRAL) mampu menyelesaikan masalah tersebut.

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat diambil suatu gambaran terkait Rera AP di Jawa yang dijalankan Kabinet Mohammad Hatta pada tahun 1948 mencakup beberapa pokok yaitu menata kembali struktur AP agar efektif dan dapat berjalan satu komando, meningkatkan kualitas supaya dapat mengimbangi pasukan Belanda serta mencegah dan menyingkirkan pihak yang mengacau atau akan menguasai AP. Beberapa pokok tersebut telah dijalankan Kabinet Mohammad Hatta, pada pokok poin pertama dan kedua masih belum sempurna, namun akan berlanjut setelah pengakuan kedaulatan. Pada pokok poin tiga telah diselesaikan, pengacau paling besar berasal dari golongan kiri yang puncaknya pada peristiwa Madiun 1948. Setelah peristiwa tersebut rencana Rera cukup berjalan sesuai dengan rencana awal. Dapat diambil suatu kesimpulan beberapa rencana Rera APRI di Jawa masa Kabinet Mohammad Hatta sudah berhasil dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

## ARSIP

ANRI, *Surat Perintah, No. 12241/Rh/TI. Berisi pembubaran MBT dan pembagian tugas pada Staf Angkatan Darat dalam Kementerian Pertahanan dan Markas Besar Angkatan Mobil.*

*Kedaulatan Rakyat*, 9 Februari 1948.

## Buku

A Daliman, *Metode Penelitian Sejarah*, Yogyakarta: Ombak, 2013.

Abdoel Fattah, *Demiliterisasi Tentara: Pasang Surut Politik Militer 1945-2004*, Yogyakarta: LKiS, 2005.

Abdul Haris Nasution, *Tentara Nasional Republik Indonesia II*, Jakarta: Seruling Masa, 1968.

\_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Gerilya dan Pertahanan Republik*, Bandung: Angkasa, 1980.

\_\_\_\_\_, *Memenuhi Panggilan Tugas 2*, Jakarta: Gunung Agung, 1983.

Atim Supomo, dkk, *BIMOB Dulu, Kini dan Esok*, Yogyakarta: Korps BRIMOB POLRI, 2015.

Petter Britton, *Profesionalisme dan Ideologi Militer Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1996

*Bunga Rampai dari Sejarah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1972.

*Diponegoro dan Pengabdianya*, Semarang: Yayasan Penerbit Diponegoro, 1977.

George Mc Turnan Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, Surakarta: UNS Press, 1995.

Himawan Soetanto, *Madiun dari Republik ke Republik*, Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2006.

Kardiyat Wiharyanto, *Sejarah Indonesia dari Proklamasi sampai Pemilu 2009*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Sanata Dharma, 2011.

Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013.

Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto, Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1975

Mohammad Hatta, "Rasionalisasi TNI dalam Tahun 1948", *Pidato di Fakultas Sastra Universitas Indonesia*, tahun 1972.

ODP Sihombing, *Pemuda Indonesia menentang Fasisme Jepang*, Jakarta: Sinar Jaya, 1962.

Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, *Sejarah TNI Jilid 1 1945-1949*, Jakarta: Pusjarah, 2000

Yogyakarta, 30 Juli 2018

Dosen Pembimbing TAS



Reviewer

